BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan makroekonomi yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya mencerminkan rendahnya kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sering digunakan sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah (Handayani & Suharianto, 2024).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50,35 juta jiwa atau sekitar 17,88% dari total penduduk Indonesia Di sisi lain, Jawa Barat juga masih menghadapi persoalan ketenagakerjaan yang cukup serius. Data BPS menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada Agustus 2024 sebesar 6,75%, lebih tinggi dibandingkan TPT nasional yang berada di kisaran 4-5%. Berdasarkan data TPT kabupaten/kota tahun 2017-2024, terlihat bahwa terjadi lonjakan tajam di berbagai wilayah akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 di hampir seluruh wilayah, seperti Kabupaten Bogor yang meningkat dari 9,11% (2019) menjadi 14,29% (2020), Kota Cimahi dari 8,09% (2019) menjadi 13,30% (2020), serta Kota

Bogor dari 9,16% (2019) menjadi 12,68% (2020). Peningkatan ini menunjukkan dampak signifikan dari guncangan ekonomi terhadap pasar tenaga kerja. Meskipun setelah tahun 2021 terjadi tren penurunan, namun pada tahun 2024 beberapa daerah masih memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi, seperti Kabupaten Bekasi (8,82%), Kota Cimahi (8,97%), dan Kota Bekasi (7,82%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan pasar tenaga kerja belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2024).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Grafik Persentase (%) Tingkat Pengangguran Kab/Kota di Jawa Barat 2017-2024

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017, 2020, dan 2024, terlihat bahwa tingkat pengangguran mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Pada tahun 2017, TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Bekasi sebesar 10,97%, sedangkan TPT

terendah berada di Kabupaten Pangandaran sebesar 3,34%. Memasuki tahun 2020, hampir seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan TPT. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan pada pasar tenaga kerja yang salah satunya dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun tersebut, Kabupaten Bogor mencatat TPT tertinggi sebesar 14,29%, diikuti Kota Cimahi sebesar 13,30% dan Kota Bogor sebesar 12,68%. Sementara itu, Kabupaten Pangandaran tetap menjadi daerah dengan tingkat pengangguran terendah, yaitu sebesar 5,08%.

Pada tahun 2024, TPT di sebagian besar kabupaten/kota mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi perekonomian dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pascapandemi. Kabupaten Pangandaran kembali menjadi daerah dengan TPT terendah, yaitu sebesar 1,58%, diikuti Kabupaten Ciamis sebesar 3,37% dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 3,74%. Di sisi lain, Kota Cimahi masih mencatat TPT tertinggi sebesar 8,97%, disusul Kabupaten Bekasi sebesar 8,82% dan Kota Sukabumi sebesar 8,34%.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran di Jawa Barat sempat meningkat tajam pada tahun 2020, kondisi pasar kerja pada tahun 2024 menunjukkan tren yang lebih baik dengan menurunnya TPT di hampir seluruh kabupaten/kota. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan tingkat pengangguran antarwilayah, di mana daerah perkotaan dan kawasan industri cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang berbasis pertanian, pariwisata, atau sektor informal. Hal

ini mengindikasikan bahwa karakteristik struktur ekonomi dan pasar kerja masing-masing daerah turut memengaruhi tingkat pengangguran yang terjadi.

Selain itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan layak sesuai kebutuhan hidup minimum. Namun, dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, kenaikan upah minimum yang melebihi tingkat keseimbangan pasar kerja dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga berpotensi menurunkan permintaan tenaga kerja dan mendorong meningkatnya pengangguran terbuka. Penelitian Lazuardi dan Santoso (2024), menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum di Provinsi Jawa Barat cenderung berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran ketika tidak diimbangi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Secara empiris, perkembangan UMK di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2024 menunjukkan tren meningkat hampir di seluruh kabupaten/kota. Pada wilayah industri utama, Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan dari Rp4.146.126 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.498.961 juta pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga Rp5.219.263 juta pada tahun 2024. Kabupaten Karawang naik dari Rp4.234.010 juta (2019) menjadi Rp4.594.324 juta (2020) dan mencapai Rp5.257.834 juta pada tahun 2024. Kota Bekasi juga meningkat dari Rp4.229.756 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.589.708 juta pada tahun 2020, lalu menjadi Rp5.343.430 juta pada tahun 2024. Kenaikan UMK yang cukup tinggi di kawasan industri ini menunjukkan besarnya tekanan biaya tenaga kerja yang dihadapi perusahaan, terutama pada sektor manufaktur padat karya.

Selain itu, Perbedaan tingkat UMK antar kabupaten/kota tersebut berpotensi memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja. Daerah dengan UMK tinggi cenderung menarik arus pencari kerja lebih besar karena menawarkan pendapatan lebih tinggi, namun jika pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding maka persaingan kerja meningkat dan pengangguran tetap tinggi. Oleh karena itu, kebijakan UMK perlu diimbangi dengan perluasan investasi, pengembangan industri, dan peningkatan kualitas tenaga kerja agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja (Handayani & Suharianto, 2024).



Sumber : Badan Pusat Statisik

Gambar 1. 2 Grafik Tingkat Upah Minimum Kab/Kota (Rupiah/Orang/Bulan) di Provinsi Jawa Barat Selama Sebulan Tahun 2017-2024

Berdasarkan data Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2024, terlihat bahwa UMK di seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, UMK tertinggi terdapat di

Kabupaten Karawang sebesar Rp3.605.272,00 juta, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp1.433.901,15 juta. Pada tahun 2020, UMK kembali meningkat dengan Kabupaten Karawang mencatat UMK tertinggi sebesar Rp4.594.324,54 juta, sementara Kabupaten Pangandaran tetap menjadi daerah dengan UMK terendah sebesar Rp1.860.591,33 juta.

Pada tahun 2024, tren kenaikan UMK masih berlanjut. Kota Bekasi memiliki UMK tertinggi sebesar Rp5.343.430,00 juta, diikuti Kabupaten Karawang sebesar Rp5.257.834,00 juta dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp5.219.263,00 juta. Sebaliknya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran menjadi daerah dengan UMK terendah, masing-masing sebesar Rp2.070.192,00 juta dan Rp2.086.126,00 juta.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa UMK di Provinsi Jawa Barat terus meningkat selama periode penelitian. Selain itu, daerah yang merupakan pusat industri, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, cenderung memiliki UMK yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang perekonomiannya masih didominasi oleh sektor pertanian dan jasa, seperti Pangandaran dan Banjar.

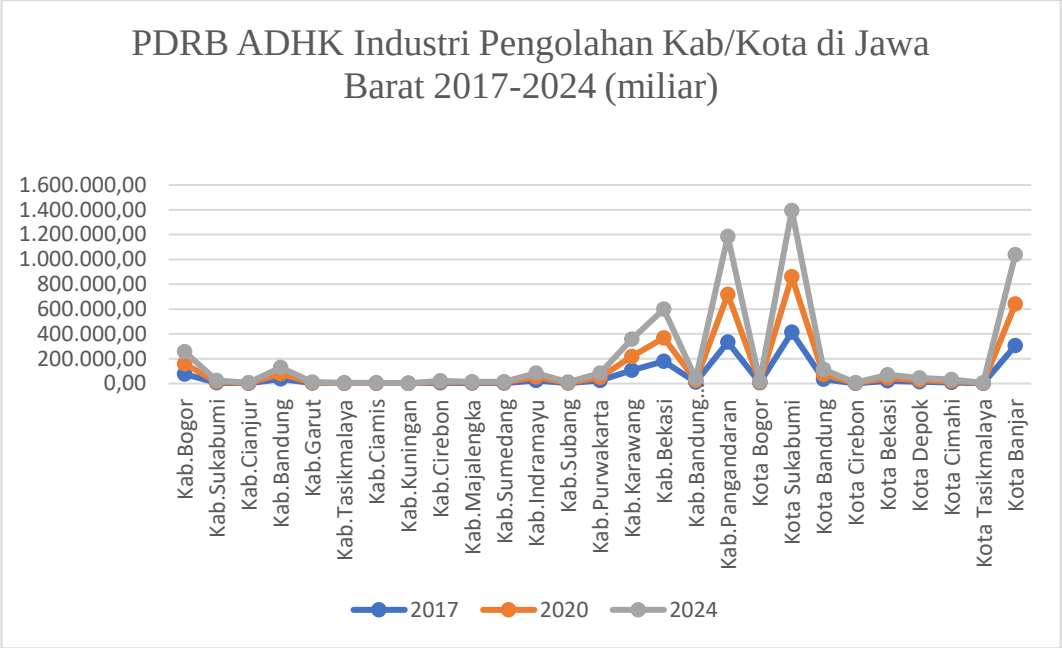
Di sisi lain, perkembangan industri pengolahan memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Jawa Barat, pada tahun 2019 nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Bekasi sebesar Rp197.168,87 miliar, Kabupaten Karawang Rp116.773,91 miliar, dan Kabupaten Bogor Rp85.429,73 miliar. Namun pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19, beberapa daerah industri mengalami penurunan, seperti Kabupaten Bekasi menjadi

Rp188.877,42 miliar dan Kabupaten Karawang menjadi Rp111.073,03 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri cukup rentan terhadap guncangan ekonomi (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024).

Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan kembali meningkat, dengan nilai tertinggi tetap berada di Kabupaten Bekasi sebesar Rp229.793,21 miliar, Kabupaten Karawang Rp138.664,96 miliar, dan Kabupaten Bogor Rp97.885,65 miliar. Sebaliknya, beberapa daerah masih memiliki nilai industri rendah, seperti Kota Cirebon Rp2.037,65 miliar, Kota Tasikmalaya Rp2.520,90 miliar, dan Kabupaten Cianjur Rp2.786,62 miliar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa industri pengolahan di Jawa Barat masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga kemampuan penyerapan tenaga kerja antar daerah juga belum merata.

PDRB industri pengolahan digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini karena dapat menggambarkan perkembangan aktivitas produksi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan di suatu daerah. Peningkatan PDRB industri pengolahan menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi yang dapat mendorong kebutuhan tenaga kerja dan menciptakan kesempatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2024 industri pengolahan menjadi salah satu lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, dengan andil sebesar 1,51% terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada triwulan III 2024 industri pengolahan memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 2,18%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri pengolahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian Jawa Barat, sehingga perkembangan

PDRB sektor ini relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024).



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 3 Grafik PDRB Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan 2010, di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2017-2024 (miliar)

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor industri pengolahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017, 2020, dan 2024, terlihat bahwa nilai PDRB industri pengolahan secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi salah satu sektor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah di Jawa Barat.

Pada tahun 2017, nilai PDRB industri pengolahan tertinggi tercatat di Kota Sukabumi sebesar Rp412.573,02 miliar, diikuti Kabupaten Pangandaran sebesar Rp334.658,36 miliar, dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp179.577,39 miliar.

Sementara itu, nilai terendah terdapat di Kota Banjar sebesar Rp305,82 miliar, Kabupaten Kuningan sebesar Rp357,83 miliar, dan Kota Cirebon sebesar Rp1.507,11 miliar.

Pada tahun 2020, sebagian besar kabupaten/kota mengalami peningkatan nilai PDRB industri pengolahan dibandingkan tahun 2017. Kota Sukabumi masih menjadi daerah dengan nilai tertinggi sebesar Rp448.372,03 miliar, diikuti Kabupaten Pangandaran sebesar Rp382.607,76 miliar dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp188.877,42 miliar. Di sisi lain, Kota Banjar tetap menjadi daerah dengan nilai terendah sebesar Rp335,92 miliar, disusul Kabupaten Kuningan sebesar Rp416,25 miliar dan Kota Cirebon sebesar Rp1.677,74 miliar.

Pada tahun 2024, peningkatan nilai PDRB industri pengolahan kembali terjadi di hampir seluruh daerah. Kota Sukabumi mencatat nilai tertinggi sebesar Rp534.043,21 miliar, diikuti Kabupaten Pangandaran sebesar Rp467.188,27 miliar, Kabupaten Bekasi sebesar Rp229.793,21 miliar, Kabupaten Karawang sebesar Rp138.664,96 miliar, dan Kabupaten Bogor sebesar Rp97.885,65 miliar. Sementara itu, nilai terendah masih terdapat di Kota Banjar sebesar Rp395,64 miliar, Kabupaten Kuningan sebesar Rp502,71 miliar, dan Kota Cirebon sebesar Rp2.037,65 miliar.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan adanya perbedaan tingkat perkembangan industri pengolahan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Beberapa daerah memiliki sektor industri yang berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, sementara daerah lainnya masih

didominasi oleh sektor ekonomi lain sehingga kontribusi industri pengolahannya relatif lebih rendah.

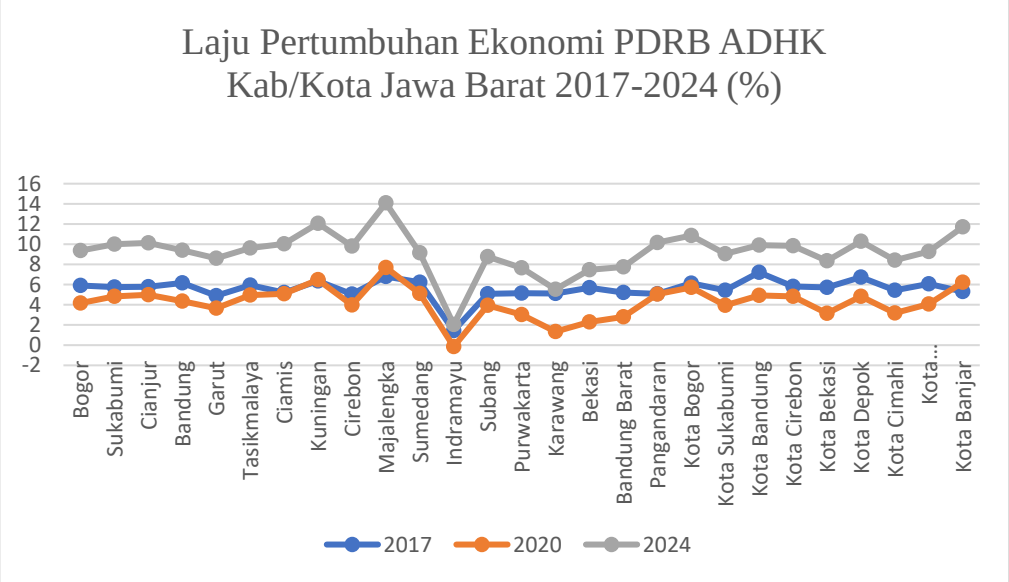
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar peluang terciptanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta membaiknya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja perekonomian daerah maupun nasional (Sukirno, 2010).

Di Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting karena wilayah ini merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2024), pada periode 2017-2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota relatif stabil di kisaran 5-7%. Namun pada tahun 2020 hampir seluruh daerah mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, seperti Kabupaten Karawang sebesar -3,80%, Kabupaten Bekasi -3,39%, dan Kota Bandung -2,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa guncangan ekonomi berdampak langsung terhadap aktivitas produksi dan pasar tenaga kerja di Jawa Barat.

Setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada tahun 2021-2024. Beberapa daerah bahkan menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi pada tahun 2024, seperti Kabupaten Majalengka sebesar 6,38%, Kabupaten Cirebon 5,83%, dan Kabupaten Kuningan 5,61%. Sementara itu, beberapa daerah lain tumbuh lebih

rendah seperti Kabupaten Indramayu sebesar 2,18% dan Kabupaten Sumedang 4,05%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi antarwilayah di Jawa Barat berlangsung tidak merata, sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja juga berbeda-beda (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024).

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Barat cenderung membaik, tingkat pengangguran di beberapa daerah masih relatif tinggi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi variabel penting untuk dikaji pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 4 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2024

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017, 2020, dan 2024, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, seluruh

kabupaten/kota mencatat pertumbuhan ekonomi positif dengan nilai berkisar antara 1,43% hingga 7,21%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Bandung sebesar 7,21%, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Indramayu sebesar 1,43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum pandemi, perekonomian daerah di Jawa Barat cenderung tumbuh dengan baik.

Pada tahun 2020, hampir seluruh kabupaten/kota mengalami kontraksi ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai pertumbuhan negatif. Kondisi tersebut terjadi akibat pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan. Kontraksi terdalam terjadi di Kabupaten Karawang sebesar -3,80%, diikuti Kabupaten Bekasi sebesar -3,39% dan Kota Bekasi sebesar -2,58%. Sementara itu, hanya beberapa daerah yang masih mampu mencatat pertumbuhan positif, seperti Kota Banjar sebesar 0,94%, Kabupaten Majalengka sebesar 0,89%, dan Kabupaten Kuningan sebesar 0,11%.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota kembali berada pada kondisi positif yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Kabupaten Majalengka sebesar 6,38%, diikuti Kabupaten Cirebon sebesar 5,83% dan Kabupaten Kuningan sebesar 5,61%. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Indramayu sebesar 2,18%, meskipun masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan yang cukup tajam pada tahun 2020 akibat pandemi, namun berhasil pulih pada tahun 2024 dengan kembalinya pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Meskipun demikian, terdapat

perbedaan tingkat pertumbuhan antarwilayah yang mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, potensi daerah, serta kemampuan masing-masing wilayah dalam mendorong aktivitas ekonomi dan proses pemulihan pascapandemi.

Berdasarkan uraian tersebut serta didukung oleh data empiris TPT kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2017-2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain upah minimum kabupaten/kota, jumlah industri pengolahan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB Industri Pengolahan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2024",** yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berbasis data.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama terkait pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2024 sebagai berikut:

1. Peran upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka: Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

tenaga kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak. Namun, dalam praktiknya, kenaikan UMK tidak selalu memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Di satu sisi, peningkatan upah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan pekerja, tetapi di sisi lain juga dapat meningkatkan beban biaya produksi bagi perusahaan. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi, seperti mengurangi jumlah tenaga kerja atau menggantinya dengan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Peran PDRB industri pengolahan terhadap tingkat pengangguran terbuka: PDRB industri pengolahan di suatu wilayah mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan potensi penciptaan lapangan kerja. Secara teoritis, semakin banyak jumlah industri, maka semakin besar peluang penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Namun, dalam kenyataannya tidak semua industri bersifat padat karya, karena sebagian industri menggunakan teknologi modern yang cenderung padat modal. Hal ini menyebabkan peningkatan PDRB industri tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah industri pengolahan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.

3. Peran pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka:

   Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menunjukkan kinerja perekonomian suatu daerah. Secara teoritis, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan produksi dan investasi, sehingga menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Namun, dalam kondisi tertentu, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang dikenal sebagai fenomena jobless growth. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta dominasi sektor-sektor yang tidak padat karya. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Upah Minimum Kab/Kota, PDRB Industri Pengolahan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2024?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kab/Kota, PDRB Industri Pengolahan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, adapun tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis karakteristik upah minimum kabupaten/kota, PDRB industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2024.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh upah minimum kabupaten/kota, PDRB industri pengolahan, pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta memberikan kontribusi. Adapun manfaat penelitian terbagi atau manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi pembangunan dan ekonomi ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh upah minimum kabupaten/kota, PDRB industri pengolahan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris mengenai dinamika pasar tenaga kerja di tingkat daerah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji hubungan antara struktur

ketenagakerjaan, kebijakan upah, dan pengangguran. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang mendukung atau memperkuat teori-teori ekonomi ketenagakerjaan, seperti teori permintaan tenaga kerja dan teori upah minimum, dalam konteks wilayah industri di negara berkembang.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan penetapan upah minimum kabupaten/kota yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna menekan tingkat pengangguran terbuka serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pelaku Industri dan Dunia Usaha

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait strategi perekrutan tenaga kerja, perencanaan biaya produksi, serta peningkatan produktivitas, sehingga mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berdaya saing.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris dan literatur pendukung dalam pengembangan penelitian di bidang ekonomi ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri pengolahan, kebijakan upah minimum, dan pengangguran terbuka di tingkat

regional.

4. Bagi Masyarakat dan Tenaga Kerja

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Jawa Barat, sehingga masyarakat, khususnya angkatan kerja, dapat meningkatkan kesiapan dan kompetensinya dalam menghadapi persaingan dunia kerja.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian mengenai upah minimum kabupaten/kota, PDRB industri pengolahan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data panel yang meliputi 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Variabel yang dianalisis terdiri atas Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel dependen, serta Upah Minimum Kabupaten/Kota, PDRB Industri Pengolahan, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen.